

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilakukan otonomi daerah dan Desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukheni, 2010)

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang Akuntabel dan Transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh

informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagai salah satu agenda reformasi dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagaimana telah direvisi mulai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan demikian berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan dalam otonomi daerah tergantung pada pimpinan dan pengelolaan keuangan negara maupun daerah melalui transparansi dan akuntabilitas (Aliyah dan Nahar, 2012).

Tujuan terbentuknya otonomi daerah yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembagunan dan meningkatkan daya saing. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, pembagunan dan pelayanan publik atas pengelolaan keuangan daerahnya semakin menguat dengan tujuan agar tercipta pemerintah yang bersih (*clean government*). Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah

yang tepat waktu, efisien, efektif, dapat diandalkan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Aliyah dan Nahar, 2012). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah (Purwanugraha dkk, 2011:91).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada public (Wahyuni dkk, 2014). Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga – lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*).

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas menandakan bahwa pemda telah mematuhi prosedur pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup administrasi dan asas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sejak tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan melalui PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah yang direvisi melalui permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Akuntanai Pemerintahan Berbasis Akruai pada pemerintah Daerah. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara serta Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan Negara. Pada intinya semua peraturan tersebut mengizinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP 2005) Adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual penuh (*full accrual basi*) pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas di terima atau di bayaran (PP No 71 tahun 2010). Manfaat dari akuntansi berbasis akrual adalah dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan lebih lengkap (komprehensif), termasuk di dalam menginformasikan potensi dan resiko fiskal seperti hak atas pendapatan yang masih akan diterima serta kewajiban yang masih akan dibayar. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah (Udiyanti,dkk.,2014). Penyusunan pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran dalam bentuk laporan keuangan harus dibuat oleh pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai perwujudan Akuntabilitas Atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Luwu.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu nampaknya belum sepenuhnya diterapkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih sering ditemukan penyimpangan dan penyalagunaan uang

publik. Hal ini ditandai dengan adanya perolehan opini TMP (*disclaimer*) pada tahun 2012 dan memperoleh opini WDP pada tahun 2013 dan 2014. Adanya kenaikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari WDP menjadi WTP selama dua tahun terakhir menandakan adanya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai SAP yang berlaku umum. Meskipun perolehan opini atas LKPD adalah WTP, bukan berarti pemerintah tersebut telah benar-benar menjadi pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP terkadang masih di temukan tindak pidana korupsi atau penggelapan uang yang mengakibatkan pemerintah harus mengalami kerugian, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu di temukan pada saat pemerintah daerah memperoleh opini WTP yakni tahun 2016 yang menyebabkan pemerintah mengalami kerugian Rp.8 milyar ([http : //infokorupsi.com](http://infokorupsi.com) diakses pada 24 Desember 2017).

Standar akuntansi pemerintah di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. penerapan SAP sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. penerapan SAP dalam laporan keuanga juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas (Zeyn, 2011) Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola

sumber-sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Adapun beberapa penelitain yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Ichal dkk 2014), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, Dan Zeyn (2011) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntabilitas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Nugraeni dan Budiantara (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Izza Maulida Santoso dkk (2017), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memandang perlu diadakan penelitian mengenai bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah setelah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Luwu. Untuk itu penulis mengangkat judul “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor BPKD Daerah Kabupaten Luwu).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKD Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Kabupaten Luwu. Untuk memberikan satu gambaran mengenai apakah laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau tidak. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti topik ini.

1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukandi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Luwu. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah (X) sementara variabel terikat adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan gambaran singkat isi penelitian secara keseluruhan, maka sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan batasan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan penjelasan pengertian penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENULISAN, Bab ini berisi desain penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan analisis tambahan.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Indra Bastian (2010:138), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah standar akuntansi pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemen maupun dipemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2007:123)

Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Nurlan Darise, 2008:39)

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu priode pelaporan yang setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan pemeriksa keuangan (BKP) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: opini Wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (WT), dan pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberika opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti laporan keuangan yang di laporkan pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dilakukan laporan keuangan sudah disajikan dan di ungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual seperti yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu:

a. Pengakuan

Pengakuan yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran yaitu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

c. Pengungkapan

Pengungkapan yaitu laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi oleh pengguna laporan keuangan dapat di tempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP 71 Nomor 2010, terhadap delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu berbasis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, periodisasi, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum di terima di rekening kas umum Negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan berbasis telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

b. Nilai historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban di catat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat di andalkan dari pada penilaian yang lain karena obyektif dan dapat di verifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat di gunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*realization*)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah telah diotoritaskan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Meningkat LRA masih merupakan laporan yang wajib di susun, maka pendapatan atau belanja basis kas di akui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagai mana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi mengunggul bentuk formal (*substance over form*)

Informasi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten berbeda

dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu di bagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. namun periode bulanan, triulan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama di terapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh satu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang di pakai dapat di ubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari beberapa Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintahan(PSAP).

Adapun PSAP dalam lampiran I PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran;
- b. PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas;

- c. PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan;
 - d. PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan;
 - e. PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi;
 - f. PSAP nomor 07 tentang akuntansi Aset tetap;
 - g. PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
 - h. PSAP Nomor 09 tentang akuntansi Kewajiban;
 - i. PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa;
 - j. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasia; dan
 - k. PSAP nomor 12 tentang laporan operasional.
- i. PSAP nomor 01 tentang penyajian lapran keuangan.

2.1.4 manfaat standar akuntansi pemerintah

Menurut Fakhruzik (2010:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintah diantaranya:

- a. Adanya laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholder dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekutas dana pemerintah
- b. Keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh peneluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

c. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Diperlukan pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah standar akuntansi pemerintah sebagai kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat (Afiah 2009). Perubahan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual menuju basis akrual penuh di harapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai laporan keuangan yang tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi serta kebebasan dalam pengelolaan keuangan pemerintah tetapi juga sebagai prestasi kinerja yang telah dicapai atas penggunaan anggaran pemerintah (LAN-RI 2011:17-18) penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benardan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pemerintah daerah tentunya akan meningkat kualitas laporan keuangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai motoris yang di pertanggungjawabkan.

2.1.6 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh

keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja (Penny Kusumastuti, 2014:2).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik; untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Elvra zeyn,2011)

Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai evaluasi tahun berikutnya (Abdul Halim,2014).

Pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inofatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Yahya,2011).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penuntasan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun publik (Tanjung,2012:12)

Akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah berupa pemberian informatika dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberikan informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat di pertanggungjawabkan (Ayu Komong, 2014)

Akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan Negara, kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. sehingga akuntabilitas public yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewasa. Standar akuntansi pemerintahan merupakan segaikan alat untuk memfasilitaskan pelaporan semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian informatika keuangan pemerintahan akan dapat menjadi

dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

2.1.7 indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Menurut Ihyaul Ulam (2010:41), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai: (a) integritas keuangan; (b) pengungkapan; (c) ketaatan terhadap pereturan perundang-undangan. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan peraturan-undang tersebut menjadi indicator dari akuntabilitas keuangan.

a. Integritas keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Integritas keuangan menggambarkan secara jujur mengenai kesesuaian dan keandalan data transaksi serta perwisata lainnya yang disajikan dan dilaporkan.

b. Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) adalah informasi yang diberikan oleh entitas pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keandalan perwisata tersebut. Didalam pengungkapan semua informasi harus diungkapkan termasuk informasi

kuantitatif (seperti komponen persediaan dalam nilai mata uang) dan komponen kualitatif (seperti tuntutan hukum) bahkan setiap kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba yang dapat mempengaruhi posisi keuangan harus diungkapkan secara khusus untuk membentuk para pengguna laporan keuangan sehingga memuat pemakaian laporan keuangan paham dan tidak salah tariff terhadap laporan keuangan tersebut. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dan pelaporan keuangan pemerintah daerah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material dilakukan pengujian kepatuhan yang berpengaruh pada perolehan opini. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat di andalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban.

2.1.8 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Adanya satu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Menurut Abdul Halim (2014) akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri:

- a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi instansi, serta program pembagunan yang dipercayakan kepadanya termasuk Pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berada dibawah wewenangnya)
- b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur.
- c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi.
- d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketetapan waktu penyampaian informasi.
- e. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi.

2.2 Penelitian terdahulu

berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zeyn (2011) Pengaruh <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> dengan organisasi komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
2.	Rinaldi (2016) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Surakarta)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh penerapan <i>good governance</i> , audit kerja dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota surakarta.
3.	Budiantara (2015) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kinerja	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dtetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.
4.	Ichlas M, Dkk (2014) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

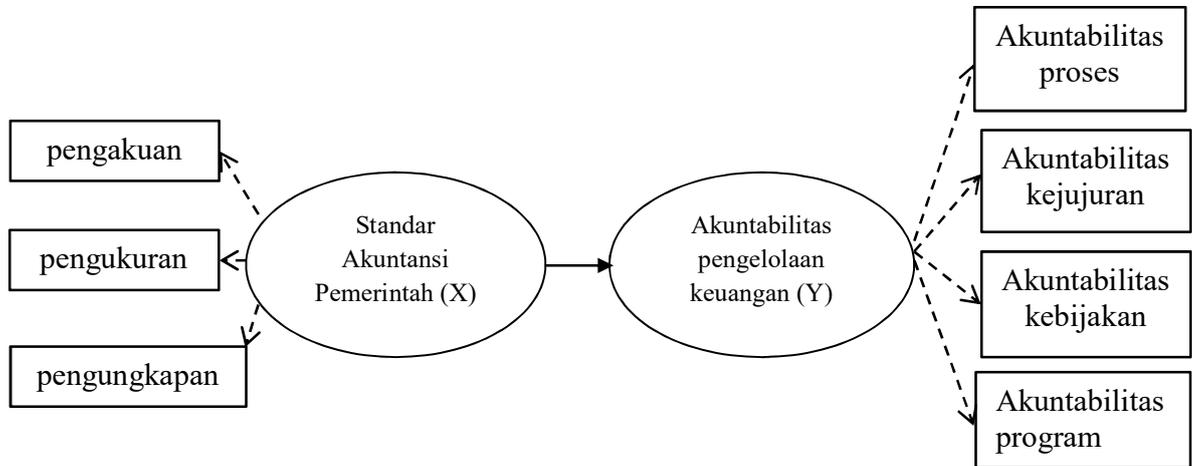
	Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh		penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama- sama mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah kota banda aceh.
5.	Robi Maulana (2014) meneliti tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah dan <i>good governance</i> terhadap akuntabilitas keuangan pada dinas pemuda dan olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten majalengka.	Metode kuantitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
6.	I Made Bagus Febrianto, dkk (2017) meneliti tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bangli	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan terdiri dari kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, keterbatasan sistem informasi, efektif sistem pengendalian internal, kepatuhan pada perundang-undangan, kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan

			memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
7.	<p>Maria Magdalena (2016) meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten jember).</p>	Metode kuantitatif	ini menyebabkan semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, serta semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
8.	<p>Indra Kurnia (2013) meneliti tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda</p>	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat.
9.	<p>Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus (2017) meneliti tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah</p>	Metode kuantitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kota Bandung mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan

	Daerah Kabupaten Bandung. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan korelasi regresi sederhana.		keuangan daerah.
10.	Ida Bagus Pijiswara, dkk (2014) meneliti tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten klungkung).	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
11.	Izza Maulida Santoso dkk (2017) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi kasus pada SKPD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang di atur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti, dimana membantu peneliti menguraikan secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Ada pun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Sebelum menentukan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah diduga bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian yang ada.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu. Dengan jangka waktu penelitian ± 2 (dua) bulan terhitung dari 20 Juli sampai 20 September 2020.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 215). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala BPKAD, Sekretaris, Bidang Akuntansi. Pengelolaan

Keuangan daerah, bidang aset, dan seluruh pegawai/staf Di Kantor Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD), Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono,2013:215) sampel dalam penelitian ini adalah seluruh staf/pegawai di kantor BPKD Kabupaten Luwu sebanyak 69 pegawai. Pengambilan sampel di lakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu kriteria-kriteria tertentu. Kreteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kreteria Penelitian Sampel

No	Kriteria
1.	Responden dalam penelitian ini adalah staf/pegawai sub bagian keuangan/akuntansi serta pegawai/staf pemegang kas pada satuan kerja.
2.	Responden dalam penelitian ini adalah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang di peroleh dari kuesioner yang diberikan kepada para anggota yang bekerja di Kantor Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan terkait objek

yang akan diteliti, kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Kuesioner yang digunakan adalah skala likert. Kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan dan responden harus menjawab dengan alternative jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor dari 1 sampai 5. Berikut ini adalah kelima alternative jawaban tersebut:

Sangat Setuju (SS) dengan skor jawaban (5)

Setuju (S) dengan skor jawaban (4)

Kurang Setuju (KS) dengan skor jawaban (3)

Tidak Setuju (TS) dengan skor jawaban (2)

Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor jawaban (1)

3.6 Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 23 for windows, program computer yang digunakan untuk menganalisis data dengan analisis statistik.

3.6.1 Uji Regresi Linear Sederhana

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksikan nilai dari variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. rumus regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = \alpha + \beta x$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan

α : konstanta

β : koefisien regresi

X : Standar Akuntansi Pemerintah

3.6.2 Uji Parsial (uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (variabel Y). signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan adalah:

- a. Jika nilai signifikan $<$ dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y, dan sebaliknya
- b. Jika nilai signifikan $>$ dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

3.6.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS.

3.6.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear sederhana dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, outokorelasi, tidak mengandung heteroskedastisitas, dan linierritas (Suliyanto,2011) uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (Suliyanto,2011).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas (Suliyanto,2011). Multi kolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disampaikan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali,2011)

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* merupakan uji statistic yang digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebalikan dari uji ini adalah *homoskedastisitas*, yaitu terjadi jika *variance* dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Di dalam analisis regresi, model yang tepat dalam menerangkannya adalah terjadi *heteroskedastisitas* atau model regresi yang terjadi *homoskedastisitas*. Pelaksanaan uji ini dilakukan dengan melihat garfik *scatterplot* antara lain prediksi variabel terikat (Dependen) yaitu ZPRED dengan residual yaitu SRESID.

3.6.6 Uji Kualitas Data

Sebelum instrument di gunakan dalam penelitian, maka instrument harus di uji terlebih dahulu. Tujuan pengujian instrument adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumennya sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya instrument yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian.

1. Uji validitas

Sapar (2017) validitas atau tidak ketetapan adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang ingin kita ukur setelah data dikumpulkan, maka pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor-skor setiap item pertanyaan dengan skor total.

2. Uji reabilitas

Sapar (2017) reabilitas adalah tingkat kepenelitian yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya bila suatu alat pengukuran di pakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang di peroleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2° 3' 45" sampai 3° 7' 30" lintang selatan dan 119° sampai 121° 43' 11" bujur timur. Kabupaten luwu dengan belopa sebagai ibu kota kabupaten terletak 335 KM dari kota Makassar dengan batas wilayah adalah Sebelah utara berbatasan dengan kota palopo dan luwu utara, sebelah timur berbatasan dengan teluk bone, sebelah selatan dengan kabupaten wajo dan sidrap serta sebelah barat dengan kabupaten tanah toraja dengan enrekang.

Dengan luas wilayah mencapai 3.000,25 KM² yang terdiri dari 21 kecamatan serta 192 desa/kelurahan. Ditinjau dari fatografi wilayah, jenis di kabupaten luwu dan dua yakni jenis yang penyebarannya terdapat di sepanjang pantai membujur dari luwu bagian selatan sampai utara dan jenis clay yang penyebarannya terdapat di kecamatan walenrang bagian timur dan kecamatan lamasi.

Berawal dari DPKD diubah menjadi BPKD berdasarkan peraturan perda yang mendasari berubahnya DPKD menjadi BPKD, pejabat unit kerja baru BPKD dilantik pada tanggal 03 januari 2017, berdasarkan peraturan daerah kabupaten luwu no 7 tahun 2016 tentang peraturan pembentukan dan perangkat daerah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor.18 tahun

2016 tentang perangkat daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

4.1.1 Tugas Dan Fungsi BPKD Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

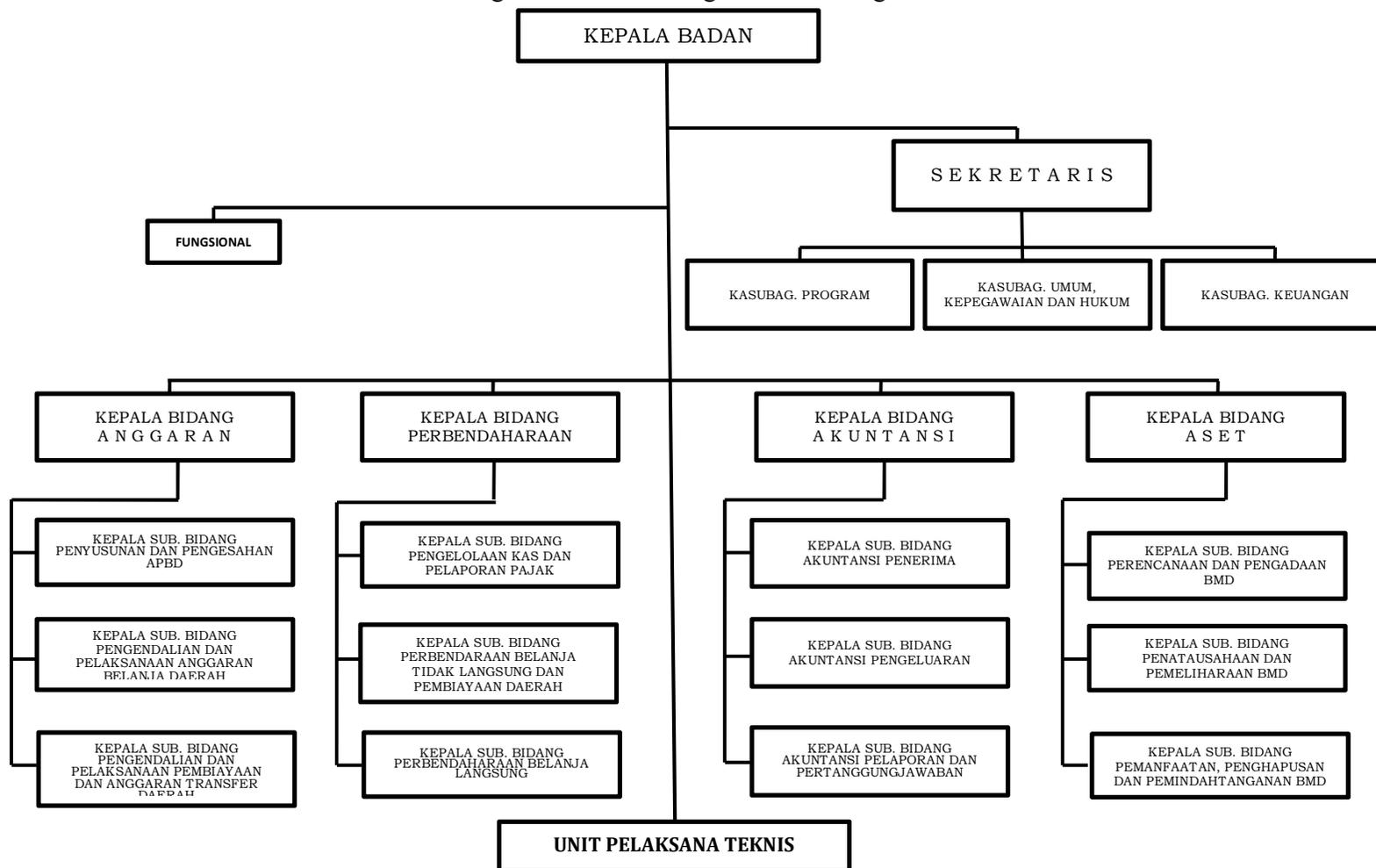
- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aet daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dib erikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris yang terdiri atas :
 1. Kepala sub bagian program

2. Kepala sub bagian umum, kepegawaian dan hukum
 3. Kepala sub bagian keuangan
- b. Kepala bidang anggaran, yaitu terdiri dari:
1. Kepala sub bidang penyusunan dan pengesaha APBD
 2. Kepala sub bidang pengendalian dan pelaksanaan anggaran belanja daerah
 3. Kepala sub badang pengendalian dan pelaksanaan penyajian dan anggaran transfer daerah
- c. Kepala sub bidang perbendaharaan, yaitu terdiri dari:
1. Kepala sub bidang pengelolaan kas dan pelaporan pajak
 2. Kepala sub bidang perbendaharaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah
 3. Kepala sub bidang perbendaharaan dan belanja langsung
- d. Kepala bidang akuntansi yang terdiri dari:
1. Kepala sub bidang akuntansi penerima
 2. Kepala sub bidang akuntansi pengeluaran
 3. Kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban
- e. Kepala bidang aset yang terdiri dari:
1. Kepala sub bidang perencanaan dan pengadaan BMD
 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD
 3. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu



4.1.2 Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu adalah:

Visi :

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Efektif, Efisien, Tranparan dan Akuntabel”

Misi :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.2 Gambaran Umum Responden

Untuk memperoleh data primer yang di peroleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang disebarakan sercara langsung kepada para responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu. Secara teknis, untuk selanjutnya penelitian di distribusikan kepada setiap responden surat perpohonan izin untuk melakukan penelitian di kantor BPKD Kabupaten Luwu, di ajukan selama ± 2 bulan dan pengambilan kuesioner dilakukan.

Adapun data penulisa perolehan mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	75	100%
2.	Kuesioner Kembali	69	92%
3.	Kuesioner yang tidak direspon	6	8%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	69	92%
n sampel yang kembali = 69			
Responden rate = $\frac{69}{75} \times 100\%$			
= 91,977%			

Sumber: data primer 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat dari 75 kuesioner yang dibagikan terdapat 6 kuesioner yang tidak direspon dan 69 kuesioner yang di isi pegawai yang bekerja di kantor BPKD kabupaten luwu berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini. Demografi responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Gambaran umum responden

Keterangan	Jumah (pegawai)
Jenis Kelamin :	
a. Laki-laki	26
b. Perempuan	43
Total	69
Tingkat Pendidikan	
a. SMA/Sederajat	11
b. Diploma	4
c. Strata -1 (S1)	48
d. Strata -2 (S2)	6
Total	69

Suber: data primer 2020

4.3 Deskripsi Data

Berdasarkan variabel dependen yaitu SAP pada pertanyaan pertama dari 69 responden yang menjawab “netral” 4 orang dan menjawab “setuju” 23 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 42 orang. berdasarkan pertanyaan kedua yang menjawab “netral” 1 orang dan menjawab “setuju” 25 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 43 orang. Berdasarkan pertanyaan ketiga yang menjawab “netral” 4 orang, dan yang menjawab “setuju” 21 orang, dan yang menjawab sangat setuju 44 orang. Pertanyaan ke empat yang menjawab “netral” 3 orang dan menjawab “setuju” 16 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 50 orang. Pertanyaan lima yang menjawab “netral” 5 orang dan menjawab setuju 29 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 35 orang. Pada pertanyaan ke enam yang menjawab “netral” 4 orang dan menjawab setuju 23 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 42 orang. Pada pertanyaan ke tujuh yang menjawab “netral” 1 orang, dan yang menjawab “setuju” 27 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 41 orang. Maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Berdasarkan variabel independen yaitu Akuntabilitas laporan keuangan dari 69 responden pada pertanyaan pertama yang menjawab yang menjawab “netral” 1 orang, dan menjawab “setuju” 23 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 45 orang. Pertanyaan kedua “netral” 2 orang dan menjawab “setuju” 45 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 22 orang. berdasarkan pertanyaan ke dua yang menjawab “netral” 2 orang dan menjawab “setuju” 34 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 33 orang. Berdasarkan pertanyaan ke empat yang menjawab “netral” 3 orang, dan yang menjawab “setuju” 35 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 31 orang. Pertanyaan ke lima yang menjawab “netral” 2 orang dan menjawab “setuju” 42 orang, dan yang menjawab “sangat setuju” 25 orang. Pertanyaan ke enam yang menjawab “netral” 7 orang dan menjawab “setuju” 33 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 29 orang. Pada pertanyaan ke tujuh yang menjawab “netral” 7 orang dan menjawab “setuju” 22 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 40 orang. Pada pertanyaan ke delapan yang menjawab “netral” 1 orang, dan yang menjawab “setuju”

27 orang dan yang menjawab “sangat setuju” 41 orang. Maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif di gunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk memahami hasil statistik deskriptif dari setiap variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	5.8	5.8	5.8
	S	23	33.3	33.3	39.1
	SS	42	60.9	60.9	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 4 orang atau 5,8% dan menjawab “setuju” 23 orang atau 33,3% dan menjawab “sangat setuju” 42 orang atau 60,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	1.4	1.4	1.4
	S	25	36.2	36.2	37.7
	SS	43	62.3	62.3	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 1 orang atau 0,09% dan menjawab “setuju” 25 orang atau 36,2%, dan menjawab sangat setuju 43 orang atau 62,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	5.8	5.8	5.8
	S	21	30.4	30.4	36.2
	SS	44	63.8	63.8	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 4 orang atau 5,8% dan menjawab “setuju” 21 orang atau 30,4%, dan menjawab sangat setuju 44 orang atau 63,8% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	4.3	4.3	4.3
	S	16	23.2	23.2	27.5
	SS	50	72.5	72.5	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 3 orang atau 4,3% dan menjawab “setuju” 16 orang atau 24,2%, dan menjawab “sangat setuju” 50 orang atau 72,5% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	7.2	7.2	7.2
	S	29	42.0	42.0	49.3
	SS	35	50.7	50.7	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 5 orang atau 7,2% dan menjawab “setuju” 29 orang atau 42,0%, dan menjawab “sangat setuju” 35 orang atau 50,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	5.8	5.8	5.8
	S	23	33.3	33.3	39.1
	SS	42	60.9	60.9	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 4 orang atau 5,8%, dan menjawab “setuju” 23 orang atau 33,3%, dan menjawab “sangat setuju” 42 orang atau 60,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	1.4	1.4	1.4
	S	27	39.1	39.1	40.6
	SS	41	59.4	59.4	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “netral” 1 orang atau 1,4%, dan menjawab “setuju” 27 orang atau 39,1%, dan menjawab “sangat setuju” 41 orang atau 59,4%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 31,99 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Tabel 4.4 uji statistik deskriptif akuntabilitas laporan keuangan**Y.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	1.4	1.4	1.4
	S	23	33.3	33.3	34.8
	SS	45	65.2	65.2	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 1 orang atau 1,4%, dan menjawab “setuju” 23 orang atau 33,3%, dan menjawab “sangat setuju” 45 orang atau 65%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	2.9	2.9	2.9
	S	45	65.2	65.2	68.1
	SS	22	31.9	31.9	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 2 orang atau 2,9%, dan menjawab “setuju” 45 orang atau 65,2%, dan menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 31,9%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	2.9	2.9	2.9
	S	34	49.3	49.3	52.2
	SS	33	47.8	47.8	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 2 orang atau 2,9%, dan menjawab “setuju” 34 orang atau 49,3%, dan menjawab “sangat setuju” 33 orang atau 47,8%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	4.3	4.3	4.3
	S	35	50.7	50.7	55.1
	SS	31	44.9	44.9	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 3 orang atau 4,3%, dan menjawab “setuju” 35 orang atau 50.7%, dan menjawab “sangat setuju” 31 orang atau 44,9%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	2.9	2.9	2.9
	S	42	60.9	60.9	63.8
	SS	25	36.2	36.2	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 2 orang atau 2,9%, dan menjawab “setuju” 42 orang atau 60,9%, dan menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 36,2%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	7	10.1	10.1	10.1
	S	33	47.8	47.8	58.0
	SS	29	42.0	42.0	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 7 orang atau 10,1%, dan menjawab “setuju” 33 orang atau 47,8%, dan menjawab “sangat setuju” 29 orang atau 42,0%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	7	10.1	10.1	10.1
	S	22	31.9	31.9	42.0
	SS	40	58.0	58.0	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 7 orang atau 10,1%, dan menjawab “setuju” 22 orang atau 31,9%, dan menjawab “sangat setuju” 40 orang atau 58,0%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

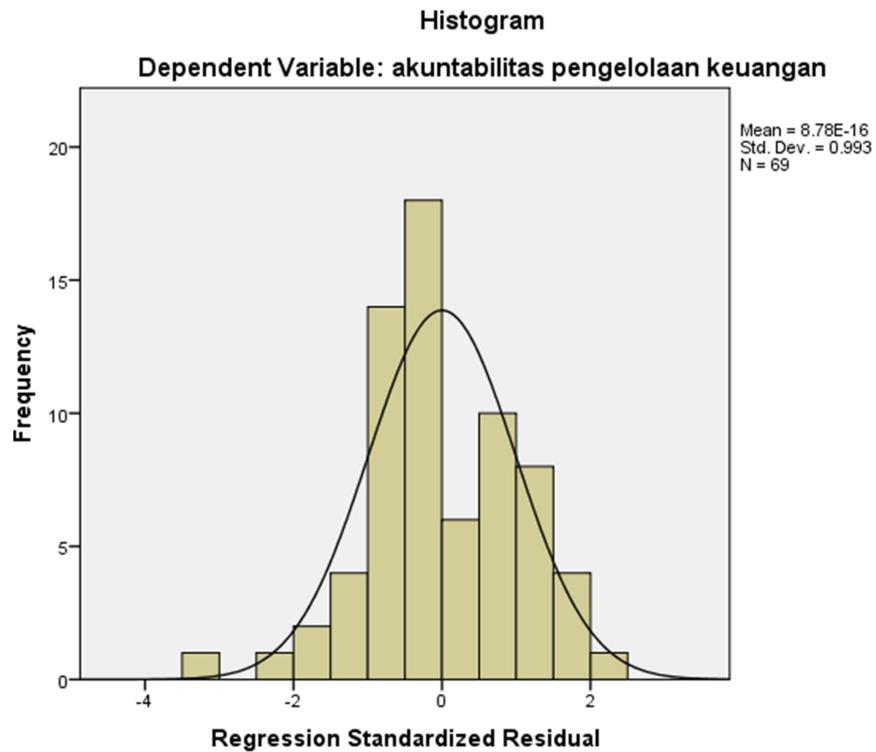
Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	1.4	1.4	1.4
	S	27	39.1	39.1	40.6
	SS	41	59.4	59.4	100.0
	Total	69	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan yang menjawab “netral” 1 orang atau 1,4%, dan menjawab “setuju” 27 orang atau 39,1%, dan menjawab “sangat setuju” 41 orang atau 59,4%, maka *mean* dari jawaban responden adalah 35.49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

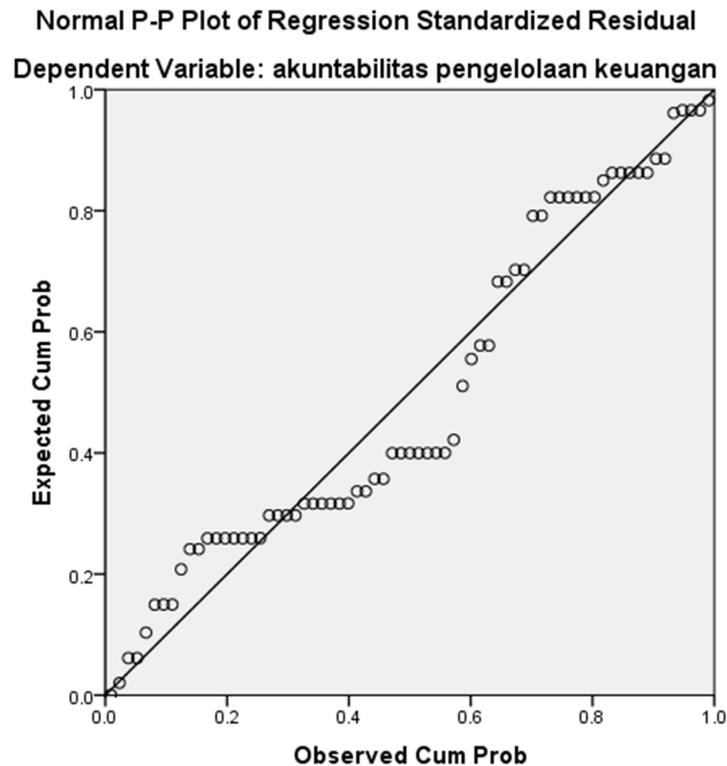
4.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang di analisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.



Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun kekiri dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:



Sumber: data primer,2020

Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apa bila residual berasal dari distribusi yang normal maka nilai sebaran sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi

korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

Tabel 4.5 Uji *multikolonieritas*

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SAP	1.000	1.000

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan keuangan

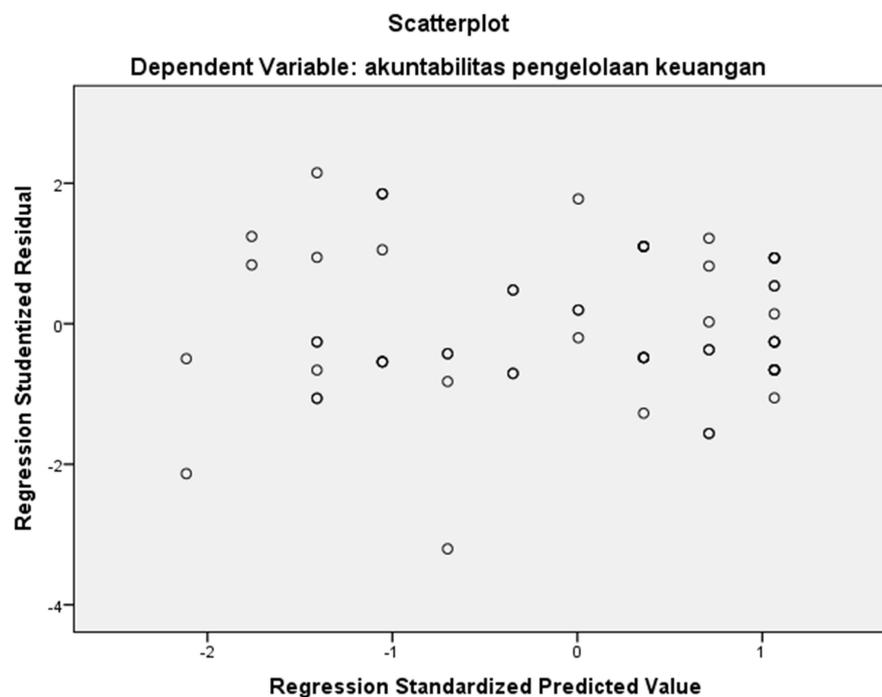
Sumber: data primer yang diolah 2020

Berdasarkan hasil uji *multikolinieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah $>0,100$ besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah variabel standar akuntansi pemerintah 1000. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antara variabel independen maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $>0,100$.

Selain itu nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 1,000 untuk standar akuntansi pemerintah Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus <10.000 . sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala *multikolonieritas* antara variabel independen dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:



Sumber: data primer yang diolah 2020
Gambar 4.4 Uji *Heteroskedastisitas*

Gambar di atas menunjukkan gambar yang diperoleh dari uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan variabel independen adalah penerapan standar akuntansi pemerintah.

4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor BPKD Kabupaten Luwu. Hasil dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	12.633	3.504
SAP (X)	.715	.109

Dari tabel hasil analisis regresi linear sederhana diatas, diperoleh koefisien variabel bebas X (Standar Akuntansi Pemerintah) sebesar 0,715 oleh karena itu persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 12,633 + 0,715 x + e$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

x : Standar Akuntansi Pemerintahan

e : Error

persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 12,633 artinya apa bila variabel bebas
- b. Bernilai nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten luwu tetap sebesar 12,633
- c. Nilai koefisien (β) sebesar 0,715 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) adalah positif atau searah, artinya jika ditingkatkan variabel standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,715

4.5 Hasil Uji Kualitas Data

4.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produg moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari r_{table} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Kerangan
Standar Akuntansi Pemerintah	X.1	0,826	0,2335	Valid
	X.2	0,575	0,2335	Valid
	X.3	0,822	0,2335	Valid
	X.4	0,549	0,2335	Valid
	X.5	0,672	0,2335	Valid
	X.6	0,826	0,2335	Valid
	X.7	0,579	0,2335	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Y.1	0,772	0,2335	Valid
	Y.2	0,668	0,2335	Valid
	Y.3	0,813	0,2335	Valid
	Y.4	0,671	0,2335	Valid
	Y.5	0,772	0,2335	Valid
	Y.6	0,704	0,2335	Valid
	Y.7	0,829	0,2335	Valid
	Y.8	0,426	0,2335	Valid

Sumber: data diolah di SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *correted item-correlation* > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

4.5.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas
Standar Akuntansi Pemerintah (X)	0.773	0,60

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disampaikan bahwa seluruh variabel di gunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak untuk digunakan menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisiensi determinan dilakukan untuk untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 koefisien determinasi adjusted R²

Model	Adjusted R Square
1	.381

a. Predictors: (Constant), SAP

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adjusted R². Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang di berikan oleh variabel independen yang terdiri dari standar akuntansi pemerintah terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

4.6.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H₀diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H₀ditolak. Bila H₀ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40)

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	3.605	.001
	SAP	6.549	.000

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan keuangan

Berdasarkan data dari tabel 4.10 diatas maka hasil pengujian variabel bebas dijabarkan sebagian berikut:

Standar akuntansi pemerintah (X_1) menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($6,549 < 1.66724$) atau $sig > \alpha$ ($0,000 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Izza Maulida Santoso dkk (2017), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Budiantara (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah hasil pembahasan pemahaman (X) Standar Akuntansi Pemerintah, (Y) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Kabupaten Luwu. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah $t_{hitung} 6,549 > t_{tabel} 1.66724$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dimana hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depen atara

individu maupun kelompok sebagai sebuah pertanggung jawaban tiap-tiap tindakan dan kepuasannya agar dapat di setujui maupundi tolak atau di berikan hukuman bilamana dikemudian adanya penyalagunaan kewenangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Selama periode pengamatan ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi bahwa uji-uji ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang menyimpang dari uji asumsi klasik, sehingga data yang diperoleh memenuhi persyaratan menggunakan model persamaan regresi linear sederhana.

Peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel independen standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 23,0 Dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan hasil. Berdasarkan hasil pengujian H_1 menunjukkan bahwa pada kantor BPKD Kabupaten Luwu standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif atau H_1 dapat diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dimana masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain :

1. Kurangnya pembahsan dan silap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode surve, wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.
2. Peneliti menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen untuk mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian antara lain:

1. Peneliti di sarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan diperlukan sampel yang lebih banyak
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidaknya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat dilakukan dengan cara pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran penelitipada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat di tentukan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang di peroleh nantinya tidak bias dan sesuai tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan 15. 2014. Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bastian, Indra, SE. Akt., M,B.A, Ph.D, (2005), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.
- Bastian, indra. 2016. Akuntabilitas sector publik: suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Budiantara M, dan Nugraeni. (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol 12 (1).
- Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group (diakses pada 03-05-2019)
- Chan, James L., dan Qi Zhang. 2012. *Government Accounting Standards and Policies. Handbook on public financial management.*(diakses pada 23-04-2019)
- Dr.Siregar, Baldric MBA., CMA., CA., Ak.april (2017), Akuntansi Sektor Publik.(diakses pada 14-05-2019)
- Elsevier Ltd, d kk(2019) Masalah akuntabilitas: Respons internal tekanan eksternal dalam organisasi yang terpapar membahas implikasi temuan kami untuk teori dan praktik. (diakses pada 14-05-2019)
- Elvira, zeyn. 2011. Pengaruh penerapan goog governance dan standar akuntansi pemerintah tentang akuntabilitas keuangan dan komutmen organisasi.
- Firdaus nova roslina,weli suijono. 2017. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terdapat akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (DPPK) pemerintah kabupateb bandung.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS.* Universitas Semarang. Semarang.

- Ghozali. 2016. akuntansi pemerintah pusat dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Jakarta salemba empat.
- Hyndman, Noel., dan Ciaran Connolly. 2011. *Accrual Accounting in the Public Sector: a Road not Always Taken. Management Accounting Research* 22 (2011)jurnal volume 13, hal 36–45.
- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Inra kurnia. 2013. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Sumatra barat.
- Kuntadi, Chris. 2008. Salah Kelola Aset, LKPD Disclaimer. *Majalah IAI*. No. 13: 14-15.
- Lestari, Prettya. dan Arief Surya Irawan. 2014. Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Volume* 10, November 2014.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Monteiro, Bento Rodrigo Pereira., dan Ricardo Corrêa Gomes. 2013. International Experiences with Accrual Budgeting in the Public Sector. *R. Cont. Fin. – USP, São Paulo*, v. 24, n. 62, p. 103-112
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Arismunandar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maulana robi. 2014. Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan good governance terhadap akuntabilitas keuangan pada dinas pemuda dan olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten majalengka.
- Mulyani, Pujianik. dan Rindah F. Suryawati. 2011. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan

- Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, VOL. 7, No.2, September 2011, 102-116.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Myers, Margaret. 2000. *Qualitative Research and The Generalizability*.
- Nugraheni, Purwaniati., dan Imam Subaweh. 2008. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1 Vol.13, April 2008, Hal.48-58.
- Nugroho 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Priyono Dwi. 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Question: Standing Firm with Proteus. *The Qualitative Report*. (Vol. 4), Num. ¾.
- Sugiyono. 2010. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2013: 215. *Populasi sebagai wilayah generalisasi*. Sugiyono. 2013. *metode penelitian bisnis*. Bandung.
- Sukhemi. 2010. *Permasalahan akuntabilitas public*.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Tanjung. 2012. *Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik*.

- Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya. Visimedia Pustaka
- Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang). Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE. BPKP. 2016. Laporan Hasil Pengawasan BPKP Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. 2010. Akuntansi Aset. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Zeyn E (2011) Pengaruh *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan. Vol.1 No. (1). Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.